



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan hasil kompilasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan disinergikan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran yang berkenaan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka menurunkan persentase kawasan kumuh. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini.

Benteng, Agustus 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman,



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Triwulan ii.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB V PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja OPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
3. Perubahan Renja OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis Perubahan Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja DPKP Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Daerah;
4. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RENJA DPKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
41. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
45. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan RENJA DPKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPKP Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan RENJA DPKP Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Perubahan RENJA DPKP Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II, dan mengacu pada Perubahan APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah Triwulan II dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 3.1.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Triwulan II

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan tugas pokok dan fungsi mengelola anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp.8.187.209.882,- (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 0,-
2. Belanja Operasi	Rp. 4.907.438.382,-
3. Belanja Modal	Rp. 3.279.771.500,-
4. Total Belanja	Rp. 8.187.209.882,-
5. Pembiayaan	Rp. 0,-

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)	Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023					
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai Akutabilitas Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Perkim	B Indeks Sesuai Predikat 88,31 Indeks	18,243,404,192 71,9 Indeks	0 Sesuai Predikat 75,5 Indeks	3,176,874,382 																	
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan	72,31 % 95,00 %	18.243.404.192 	0,00 % 0,00 %	0 85,00 %	70,28 % 	3.176.874.382 															
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja yang di selesaikan tepat waktu	100,00%	463.234.700	0,00	0	100,00%	36.305.000	50,00%	5.090.000	0,00%	14.756.000	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	19.846.000	10,00%	19.846.000	10,00%	4,28%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	166,169,000	0	0	3	12,497,000	0	1,600,000	0	5,357,000	0	0	0	0	6,957,000	0	6,957,000	0,00%	4,19%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai
		1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	116,899,700	0	0	1	9,566,000	1	1,520,000	0	4,718,000	0	0	0	0	6,238,000	1	6,238,000	20,00%	5,34%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapai
		1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	103,437,000	0	0	1	6,466,000	0	600,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0,00%	1,74%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	76,729,000	0	0	1	7,776,000	1	1,370,000	0	3,481,000	0	0	0	0	4,851,000	1	4,851,000	20,00%	6,32%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023	
											I		II		III		IV									13=9+10+11+12
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12				K
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	12.817.599.187	0,00	0	100,00%	2.424.701.182	71,67%	355.766.392	0,00%	801.328.776	0,00%	0	0,00%	0	71,67%	1.157.095.168	14,21%	1.157.095.168	14,21%	9,03%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	129	12.116.200.000	0	0	25	2.344.484.582	25	345.526.392	0	786.923.776	0	0	0	25	1.132.450.168	25	1.132.450.168	19,38%	9,35%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapai	
		1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	438.377.887	0	0	1	69.143.000	1	9.400.000	0	13.750.000	0	0	0	1	23.150.000	1	23.150.000	20,00%	5,28%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapai	
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	142.002.500	0	0	1	4.120.000	1	840.000	0	0	0	0	0	1	840.000	1	840.000	20,00%	0,59%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapai	
		1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	26.298.800	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai		
		1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	60	94.720.000	0	0	12	3.453.600	7	0	0	655.000	0	0	0	7	655.000	7	655.000	11,67%	0,69%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	152.536.000	0,00	0	100,00%	9.433.000	0,00%	0	0,00%	2.725.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.725.000	0,00%	2.725.000	0,00%	1,79%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023		
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12								13=9+10+11+12	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
		1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	89,440,000	0	0	1	1,385,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	580,000	0	580,000	0,00%	0,65%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	31,548,000	0	0	1	4,851,000	0	0	0	1,328,000	0	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000	0,00%	4,21%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	31,548,000	0	0	1	3,197,000	0	0	0	817,000	0	0	0	0	817,000	0	817,000	0,00%	2,59%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100,00%	52.597.600	0,00	0	100,00%	11.664.000	0,00%	0	0,00%	1.114.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.114.000	0,00%	1.114.000	0,00%	2,12%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdminstrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	26,298,800	0	0	1	6,332,000	0	0	0	632,000	0	0	0	0	632,000	0	632,000	0,00%	2,40%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	26,298,800	0	0	1	5,332,000	0	0	0	482,000	0	0	0	0	482,000	0	482,000	0,00%	1,83%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100,00%	2.507.875.000	0,00	0	100,00%	298.448.500	0,00%	66.377.976	0,00%	128.080.470	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	194.458.446	0,00%	194.458.446	0,00%	7,75%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	113,615,000	0	0	1	3,015,000	0	0	0	3,015,000	0	0	0	0	3,015,000	0	3,015,000	0,00%	2,65%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	5	313,500,000	0	0	1	22,860,000	0	0	0	10,227,000	0	0	0	0	10,227,000	0	10,227,000	0,00%	3,26%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	5	234,600,000	0	0	1	14,887,500	0	728,000	0	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000	0,00%	0,31%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	89,910,000	0	0	1	6,000,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0,00%	1,67%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023			
									I		II		III		IV											
									9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5	339,975,000	0	0	1	51,686,000	0	0	0	29,735,000	0	0	0	0	0	29,735,000	0	29,735,000	0,00%	8,75%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1,416,275,000	0	0	1	200,000,000	0	65,649,976	0	83,603,470	0	0	0	0	0	149,253,446	0	149,253,446	0,00%	10,54%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100,00%	606,929,300	0,00	0	100,00%	40,807,000	0,00%	0	100,00%	40,807,000	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	40,807,000	20,00%	40,807,000	20,00%	6,72%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit)	25	606,929,300	0	0	5	40,807,000	0	0	5	40,807,000	0	0	0	0	5	40,807,000	5	40,807,000	20,00%	6,72%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapai
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	719,538,405	0,00	0	100,00%	128,125,700	0,00%	17,916,924	0,00%	39,463,008	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	57,379,932	0,00%	57,379,932	0,00%	7,97%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	5	92,600,000	0	0	1	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0,00%	7,02%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	626,938,405	0	0	1	121,625,700	0	17,916,924	0	32,963,008	0	0	0	0	0	50,879,932	0	50,879,932	0,00%	8,12%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100,00%	923.094.000	0,00	0	100,00%	227.390.000	0,00%	76.838.876	0,00%	47.670.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	124.508.876	0,00%	124.508.876	0,00%	13,49%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	105	684,340,000	0	0	21	110,940,000	0	42,421,876	0	22,300,000	0	0	0	0	0	64,721,876	0	64,721,876	0,00%	9,46%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200	223,754,000	0	0	40	16,450,000	0	0	0	13,870,000	0	0	0	0	0	13,870,000	0	13,870,000	0,00%	6,20%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha- bitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	15,000,000	0	0	1	100,000,000	0	34,417,000	0	11,500,000	0	0	0	0	0	45,917,000	0	45,917,000	0,00%	306,11%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
2	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah			Rasio Rumah Layak Huni	0,48 %	23,669,482,701	0,48 %	0	0,48 %	3,296,255,800																	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00 %	1.824.961.542	0,00 %	0	100,00 %	747.590.600																	
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00 %		0,00 %		100,00 %																		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yang akan direhabilitasi	1,00 Dokumen	550.000.000	0,00	0	1,00 Dokumen	60.000.000	0,00%	4.600.000	0,00%	22.940.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	27.540.000	0,00%	27.540.000	0,00%	5,01%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi				Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)				Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
						I		II		III		IV		Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi				Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023				Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)													
						6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12				14=7+13				15=14/6x100							
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5	150,000,000	0	0	1	20,000,000	0	1,600,000	0	9,870,000	0	0	0	0	0	11,470,000	0	11,470,000	0,00%	7,65%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai									
		1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	5	150,000,000	0	0	1	20,000,000	0	1,600,000	0	10,270,000	0	0	0	0	0	11,870,000	0	11,870,000	0,00%	7,91%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai									
		1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	5	250,000,000	0	0	1	20,000,000	0	1,400,000	0	2,800,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0,00%	1,68%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai									
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tersedia	1,00 Dokumen	423.961.542	0,00	0	1,00 Dokumen	27.590.600	0,00%	0	0,00%	6.110.800	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.110.800	0,00%	6.110.800	0,00%	1,44%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
		1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	250	194,325,942	0	0	50	5,995,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai									
		1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	114,817,800	0	0	1	6,545,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)				Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)				Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023																								
						6					7				8						9						10				11				12				13=9+10+11+12				14=7+13				15=14/6x100			
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	5	114,817,800	0	0	1	15,050,200	0	0	0	6,110,800	0	0	0	0	0	6,110,800	0	6,110,800	0,00%	5,32%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai																								
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun dan diperbaiki	1,00 Dokumen	851.000.000	0,00	0	1,00 Dokumen	660.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																										
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban BencanaKabupaten/ Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	35	851,000,000	0	0	7	460,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai																								
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban BencanaKabupaten/ Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0	0	4	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai																								
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	6,33 %	5.671.795.853	0,00 %		0 3,16 %	1.254.332.600																																								
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitn izin pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman	1,00 Dokumen	1.564.884.311	0,00	0	1,00 Dokumen	220.699.000	0,00%	2.800.000	0,00%	5.600.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8.400.000	0,00%	8.400.000	0,00%	0,54%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
		1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi (Dokumen)	5	1,237,000,000	0	0	1	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai																								
		1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman danPermukiman Kumuh (Laporan)	5	327,884,311	0	0	1	45,699,000	0	2,800,000	0	5,600,000	0	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0,00%	2,56%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dielevaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dielevaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100												
		1.04.06.2.01	Urusan Penyelenggaraan (PSU) Perumahan	Persentase urusan penyelenggaraan (PSU) perumahan	1,00 Dokumen	13.483.948.221	0,00	0	1,00 Dokumen	3.686.202.900	0,00%	96.082.700	1,33%	140.861.850	0,00%	0	0,00%	0	1,33%	637.634.660	0,44%	637.634.660	44,44%	3,98%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.2.01.01	Penencanaan (penyediaan) Penyediaan PSU/Perumahan	Jumlah Dokumen Penencanaan Penyediaan PSU/Perumahan (Dokumen)	5	520.000.000	0	0	1	108.200.400	0	65.281.500	0	73.567.800	0	0	0	0	0	130.048.400	0	130.048.400	0,00%	26,70%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai
		1.04.06.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	70	12.443.848.221	0	0	20	3.400.802.000	0	20.660.000	1	365.220.200	0	0	0	1	381.886.200	1	381.886.200	1,33%	3,07%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5	520.000.000	0	0	1	45.200.000	0	4.631.200	0	12.168.800	0	0	0	0	18.800.000	0	18.800.000	0,00%	3,23%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Persentase pelaksanaan pengumpulan sertifikasi, kualifikasi, dan akreditasi	100,00 %	13.588.670.820	0,00 %	0	100,00 %	3.716.002.800																
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dielevaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dielevaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
				6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100												
		1.04.06.2.01	Sertifikasi dan (akreditasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Penencanaan Jumlah serta Penencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan registrasi yang melaksanakan penencanaan dan penencanaan rumah serta penencanaan PSU	1,00 Laporan	106.822.689	0,00	0	1,00 Laporan	20.800.000	0,00%	1.631.200	0,00%	7.004.985	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.686.185	0,00%	11.686.185	0,00%	11,04%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penarikan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penarikan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	5	106.822.689	0	0	1	20.800.000	0	1.631.200	0	7.004.985	0	0	0	0	11.686.185	0	11.686.185	0,00%	11,04%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Belum Tercapai	
Total Target (Rp)										6.187.209.882	Total Realisasi (Rp)										2.206.433.267					
											Rata-rata capaian kinerja (%)										13,62	26,96				
											Predikat kinerja										SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkim			63,03	70,28	70,53	71,51	53,52		60,00	65,00	
2.	Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			83,00	85,00	88,00	91,00			80,00	85,00	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Perkim (%)			71,90	75,50	79,50	84,00			75,00	79,00	
4.		Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)		100	100	100	100	89,49	99,17	100	100	
5.		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)		100	100	100	100			100	100	
6.			Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)	2,11	3,16	4,22	5,27	6,32		4,22	5,27	
7.			Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	3,72	5,91	8,14	10,4	1,31		8,14	10,4	
8.			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0,58	1,41	3,42	8,27	2,04		3,42	8,27	
9.			Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%)	100	100	100	100	100		100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar (DPKP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku dan masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada bidang perumahan dan bidang yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan kawasan permukiman.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan nomenklatur pada kegiatan yang berakibat pada tidak matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2023, isu-isu penting yang mendasari adalah :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,
- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman, dan
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Laporan Hasil Penginputan Sipd

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan Renja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar serta Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan kegiatan Perubahan Renja tahun 2023 harus efektif dan efisien sehingga diupayakan keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten, dan satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana kerja dan pendanaan tersebut memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Pada tahun 2023 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 7.962.209.882,- dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 8.187.209.882 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Renja DPKP tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tersaji pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan SKPD 2023
Kabupaten Kepulauan Seelayar

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8.187.209.882		220.380.400	445.380.400	7.962.209.882
					PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8.187.209.882		220.380.400	445.380.400	7.962.209.882
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Penunjang administrasi pelayanan, peningkatan kinerja perangkat daerah, persentase tersedianya administrasi penunjang perangkat daerah		Kab. Kep Selayar		3.176.874.382	DAU	131.593.000	31.593.000	3.276.874.382
					Kegiatan :										
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				36.305.000			950.000	35.355.000
			01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	2 dokumen	12.497.000	DAU		170.000	12.327.000
			02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 dokumen	9.566.000	DAU		220.000	9.346.000
			03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 dokumen	6.466.000	DAU		470.000	5.996.000
			06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen/laporan capaian kinerja	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 dokumen	7.776.000	DAU		90.000	7.686.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan				2.424.701.182			2.370.000	2.422.331.182
			01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	ASN	Kec. Benteng	26 orang	2.344.484.582	DAU			2.344.484.582
			03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ASN	Kec. Benteng	12 bulan	69.143.000	DAU			69.143.000
			05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen/laporan keuangan tepat waktu	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	2 dokumen	4.120.000	DAU		690.000	3.430.000
			06		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 laporan	3.500.000	DAU		850.000	2.650.000
			08		Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi anggaran		Jumlah laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 laporan	3.453.600	DAU		830.000	2.623.600

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah pada perangkat daerah				9.433.000		-	3.800.000	5.633.000
	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				1.385.000	DAU		-	1.385.000
	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang sudah direkonsiliasi				4.851.000	DAU		1.600.000	3.251.000
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pembukuan barang milik daerah pada SKPD				3.197.000	DAU		2.200.000	997.000
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian				11.664.000		-	9.050.000	2.614.000
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian	ASN	Kec. Benteng	1 laporan	6.332.000	DAU		4.950.000	1.382.000
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian	ASN	Kec. Benteng	1 laporan	5.332.000	DAU		4.100.000	1.232.000
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum				298.448.500		106.113.000	-	404.561.500
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	3.015.000	DAU			3.015.000
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	22.860.000	DAU	2.038.000		24.898.000
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	14.887.500	DAU	4.474.000		19.361.500
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen/jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	6.000.000	DAU			6.000.000
	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah ATK yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	51.686.000	DAU	16.068.000		67.754.000
	09	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	250 SPD	200.000.000	DAU	83.533.000		283.533.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah				40.807.000				40.807.000
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	5 jenis	40.807.000	DAU			40.807.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				128.125.700			15.423.000	112.702.700
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa surat menyurat	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	6.500.000	DAU			6.500.000
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	3 jenis	121.625.700	DAU		15.423.000	106.202.700
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	x			227.390.000		25.480.000		252.870.000
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dipelihara	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	21 unit	110.940.000	DAU	25.480.000		136.420.000
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	6 jenis	16.450.000	DAU			16.450.000
				09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Luasan gedung kantor yang terpelihara	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	790 m2	100.000.000	DAU			100.000.000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		Kab. Kep Selayar		747.590.600	DAU	-	272.540.400	475.050.200
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah data Rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yang akan direhabilitasi				60.000.000		-	-	60.000.000
1	04	02	2.01	01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 dokumen	-	DAU	-	-	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	02	2.01	02		Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen hasil identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 dokumen	-	DAU	-		-
1	04	02	2.01	03		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen/Laporan rumah korban bencana	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 laporan	20.000.000	DAU			20.000.000
1	04	02	2.01	04		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana	Dokumen/Laporan kerusakan rumah akibat bencana	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 laporan	20.000.000	DAU			20.000.000
1	04	02	2.01	05		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Surat Keputusan Penerima bantuan	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	SK	20.000.000	DAU			20.000.000
1	04	02	2.02			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi terkait penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota				27.590.600			12.540.400	15.050.200
				01		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Mayarakat	Kec. Benteng	50 orang	-	DAU			-
				02		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan					-	DAU			-
				03		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Mayarakat	Kec. Benteng	50 orang	-	DAU			-
				04		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Surat Keputusan Penerima bantuan	Mayarakat	Kec. Benteng	Surat Keputusan	5.995.200	DAU		5.995.200	-
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana					6.545.200	DAU		6.545.200	-
				06		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen/laporan hasil koordinasi	Mayarakat	Kec. Benteng	1 Dokumen/ Laporan	15.050.200	DAU			15.050.200

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun dan diperbaiki		Kab. Kep Selayar		660.000.000		-	260.000.000	400.000.000
				01		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang diperbaiki	Mayarakat	Kab. Kep Selayar		460.000.000	DAU		260.000.000	200.000.000
				02		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Site Plan bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah								-
				03		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan untuk pembangunan								-
				04		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	3 unit	200.000.000	DAU		-	200.000.000
				05		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten								-
				06		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Luas lingkungan perumahan yang terpelihara								-
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mayarakat	Kab. Kep Selayar		-				-
				01		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									-
				02		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan rumah susun umum dan / atau rumah khusus		Jumlah rumah susun/rumah khusus yang dikelola	Mayarakat		158 unit	-				-
						Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun					-				-
				02		Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	Dokumen administrasi penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	Mayarakat	Kec. Bontosikuyu, dan Kec. Pasimarannu	1 dokumen	-				-
1	04	02	2.06		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		Terlaksananya kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan				-		-	-	-
				01		Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Rekomendasi penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Mayarakat	Kec. Benteng	1 dokumen	-			-	-
				02		Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana									-
				03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 Laporan	-			-	-
				04		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum									-
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		Terlaksananya kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Mayarakat			-		-	-	-
				01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Mayarakat	Kec. Benteng	1 dokumen	-			-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Luas kawasan permukiman kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya				506.742.000		1.000.900	141.001.000	366.741.900
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Tersedianya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar		220.699.000		744.900	-	221.443.900
		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	DAU			-
		02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	175.000.000	DAU			175.000.000
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	45.699.000	DAU	744.900		46.443.900
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luasan Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar		81.478.000		256.000	-	81.734.000
		01	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Mayarakat	Kec. Bontoharu	Profil kumuh 1 Kecamatan	-	DAU			-
		02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Mayarakat			-				-
		03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di permukiman kumuh	Mayarakat	Kec. Bontomate'ne dan Bontosikuyu	2 Kecamatan	17.050.000	DAU		-	17.050.000
		04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Mayarakat	Kec. Bontomate'ne dan Bontosikuyu	2 Kecamatan	13.450.000	DAU			13.450.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Mayarakat	Kec. Bontomate'ne dan Bontosikuyu	2 Laporan	28.262.000	DAU	-		28.262.000
	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terciptanya permukiman kumuh yang teratur dan baik	Mayarakat			-	DAU			-
	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Tersedianya laporan serah terima bagi masyarakat terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mayarakat	Kec. Benteng, Bontoharu dan Bontomate'ne	1 Dokumen	-	DAU			-
	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	22.716.000	DAU	256.000		22.972.000
1 04 03 2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar		204.565.000		-	141.001.000	63.564.000
	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Site Plan	Mayarakat	Kec. Benteng		100.000.000	DAU		100.000.000	-
	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	100 unit	40.000.000	DAU		40.000.000	-
	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU			Kabupaten Kepulauan Selayar		-	DAU			-
	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	26.979.000	DAU	-	1.001.000	25.978.000
	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah KK yang mendapat banyuan uang sewa rumah tinggal		Kabupaten Kepulauan Selayar	10 KK	-	DAU		-	-
	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	1 kawasan		-	DAU		-	-
	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh		Kabupaten Kepulauan Selayar		37.586.000	DAU	-	-	37.586.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Cakupan pembinaan penanganan kawasan permukiman kumuh		Kab. Kep Selayar		40.000.000		12.540.500	-	52.540.500
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										-
				01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani	Masyarakat	Kab. Kep Selayar	80 unit	40.000.000	DAK	12.540.500		52.540.500
				02		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						DAU			-
				03		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						DAU			-
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Presentase PSU yang terpeliharaan dan terbangun		Kab. Kep Selayar		3.695.202.900		75.246.000	-	3.770.448.900
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Masyarakat			3.695.202.900		75.246.000	-	3.770.448.900
				01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan		Kec. Benteng	1 Dokumen	189.200.400	DAU	20.000.000	-	209.200.400

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	Penyediaan PSU Perumahan			Kab. Kep Selayar	30 Paket	3.460.802.500	DAU	38.001.100		3.498.803.600
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan			Kab. Kep Selayar	1 Dokumen	45.200.000	DAU	17.244.900		62.444.900
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kep Selayar		20.800.000	DAU	-	246.000	20.554.000
			Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah usaha jasa/pelaksana perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan kecil yang tersertifikasi			20.800.000			246.000	20.554.000
			Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				20.800.000			246.000	20.554.000

BAB IV

PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Mengingat masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian–penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Membangun terus kemitraan dengan semua *stakeholder* merupakan kunci keberhasilan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat dilaksanakan oleh satu OPD saja melainkan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan/ berkelanjutan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 merupakan ringkasan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengingat masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan

beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan; dan
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Demikian Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Semoga Perubahan Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2023.

Benteng, Agustus 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman,

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN SKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	04				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8,187,209,882		220,380,400	445,380,400	7,962,209,882
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8,187,209,882		220,380,400	445,380,400	7,962,209,882
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Penunjang administrasi pelayanan, peningkatan kinerja perangkat daerah,persentase tersedianya administrasi penunjang perangkat daerah		Kab. Kep Selayar		3,176,874,382	DAU	131,593,000	31,593,000	3,276,874,382
					Kegiatan :										
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				36,305,000			950,000	35,355,000
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	2 dokumen	12,497,000	DAU		170,000	12,327,000
				02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 dokumen	9,566,000	DAU		220,000	9,346,000
				03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 dokumen	6,466,000	DAU		470,000	5,996,000
				06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan capaian kinerja	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 dokumen	7,776,000	DAU		90,000	7,686,000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan				2,424,701,182			2,370,000	2,422,331,182
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	ASN	Kec. Benteng	26 orang	2,344,484,582	DAU			2,344,484,582
				03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ASN	Kec. Benteng	12 bulan	69,143,000	DAU			69,143,000
				05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen/laporan keuangan tepat waktu	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	2 dokumen	4,120,000	DAU		690,000	3,430,000
				06		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 laporan	3,500,000	DAU		850,000	2,650,000
				08		Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 laporan	3,453,600	DAU		830,000	2,623,600

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah pada perangkat daerah				9,433,000		-	3,800,000	5,633,000
				01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				1,385,000	DAU		-	1,385,000
				05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang sudah direkonsiliasi				4,851,000	DAU		1,600,000	3,251,000
				06		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pembukuan barang milik daerah pada SKPD				3,197,000	DAU		2,200,000	997,000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian				11,664,000		-	9,050,000	2,614,000
				03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian	ASN	Kec. Benteng	1 laporan	6,332,000	DAU		4,950,000	1,382,000
				04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian	ASN	Kec. Benteng	1 laporan	5,332,000	DAU		4,100,000	1,232,000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum				298,448,500		106,113,000	-	404,561,500
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	3,015,000	DAU			3,015,000
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	22,860,000	DAU	2,038,000		24,898,000
				05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	14,887,500	DAU	4,474,000		19,361,500
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen/jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	6,000,000	DAU			6,000,000
				07		Penyediaan bahan/material	Jumlah ATK yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	51,686,000	DAU	16,068,000		67,754,000
				09		Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	250 SPD	200,000,000	DAU	83,533,000		283,533,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah				40,807,000				40,807,000
				06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang tersedia	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	5 jenis	40,807,000	DAU			40,807,000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				128,125,700			15,423,000	112,702,700
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa surat menyurat	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	12 bulan	6,500,000	DAU			6,500,000
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	3 jenis	121,625,700	DAU		15,423,000	106,202,700
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	x			227,390,000		25,480,000		252,870,000
				01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dipelihara	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	21 unit	110,940,000	DAU	25,480,000		136,420,000
				06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	6 jenis	16,450,000	DAU			16,450,000
				09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Luasan gedung kantor yang terpelihara	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	790 m2	100,000,000	DAU			100,000,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		Kab. Kep Selayar		747,590,600	DAU	-	272,540,400	475,050,200
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah data Rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yang akan direhabilitasi				60,000,000		-	-	60,000,000
1	04	02	2.01	01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 dokumen	-	DAU	-		-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	02	2.01	02		Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen hasil identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 dokumen	-	DAU	-		-
1	04	02	2.01	03		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen/Laporan rumah korban bencana	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 laporan	20,000,000	DAU			20,000,000
1	04	02	2.01	04		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana	Dokumen/Laporan kerusakan rumah akibat bencana	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	1 laporan	20,000,000	DAU			20,000,000
1	04	02	2.01	05		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Surat Keputusan Penerima bantuan	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	SK	20,000,000	DAU			20,000,000
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi terkait penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota				27,590,600			12,540,400	15,050,200
				01		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Mayarakat	Kec. Benteng	50 orang	-	DAU			-
				02		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan					-	DAU			-
				03		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Mayarakat	Kec. Benteng	50 orang	-	DAU			-
				04		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Surat Keputusan Penerima bantuan	Mayarakat	Kec. Benteng	Surat Keputusan	5,995,200	DAU		5,995,200	-
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana					6,545,200	DAU		6,545,200	-
				06		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen/laporan hasil koordinasi	Mayarakat	Kec. Benteng	1 Dokumen/ Laporan	15,050,200	DAU			15,050,200

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun dan diperbaiki		Kab. Kep Selayar		660,000,000		-	260,000,000	400,000,000
				01		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang diperbaiki	Mayarakat	Kab. Kep Selayar		460,000,000	DAU		260,000,000	200,000,000
				02		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Site Plan bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah								-
				03		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan untuk pembangunan								-
				04		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun	Mayarakat	Kab. Kep Selayar	3 unit	200,000,000	DAU		-	200,000,000
				05		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten								-
				06		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Luas lingkungan perumahan yang terpelihara								-
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mayarakat	Kab. Kep Selayar		-				-
				01		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									-
				02		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan rumah susun umum dan / atau rumah khusus		Jumlah rumah susun/rumah khusus yang dikelola	Mayarakat		158 unit	-				-
						Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun					-				-
				02		Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	Dokumen administrasi penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	Mayarakat	Kec. Bontosikuyu, dan Kec.Pasimarannu	1 dokumen	-				-
1	04	02	2.06		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		Terlaksananya kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan				-		-	-	-
				01		Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Rekomendasi penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Mayarakat	Kec. Benteng	1 dokumen	-			-	-
				02		Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana									-
				03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	ASN/Non ASN	Kec. Benteng	1 Laporan	-			-	-
				04		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum									-
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		Terlaksananya kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Mayarakat			-		-	-	-
				01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Mayarakat	Kec. Benteng	1 dokumen	-			-	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Luas kawasan permukiman kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya				506,742,000		1,000,900	141,001,000	366,741,900
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Tersedianya Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar		220,699,000		744,900	-	221,443,900
				01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	DAU			-
				02		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Perda/Perbup terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kumuh	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	175,000,000	DAU			175,000,000
				03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	45,699,000	DAU	744,900		46,443,900
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luasan Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar		81,478,000		256,000	-	81,734,000
				01		Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen hasil survey dan penetapan lokasi permukiman kumuh	Mayarakat	Kec. Bontoharu	Profil kumuh 1 Kecamatan	-	DAU		-	-
				02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen perencanaan dan rekomendasi pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh	Mayarakat			-				-
				03		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di permukiman kumuh	Mayarakat	Kec. Bontomate'ne dan Bontosikuyu	2 Kecamatan	17,050,000	DAU		-	17,050,000
				04		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh	Mayarakat	Kec. Bontomate'ne dan Bontosikuyu	2 Kecamatan	13,450,000	DAU			13,450,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Mayarakat	Kec. Bontomate'ne dan Bontosikuyu	2 Laporan	28,262,000	DAU	-		28,262,000
				06		Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terciptanya permukiman kumuh yang teratur dan baik	Mayarakat			-	DAU			-
				07		Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Tersedianya laporan serah terima bagi masyarakat terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mayarakat	Kec. Benteng, Bontoharu dan Bontomate'ne	1 Dokumen	-	DAU			-
				08		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Dokumen	22,716,000	DAU	256,000		22,972,000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar		204,565,000		-	141,001,000	63,564,000
				01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Site Plan	Mayarakat	Kec. Benteng		100,000,000	DAU		100,000,000	-
				02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	100 unit	40,000,000	DAU		40,000,000	-
				03		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU			Kabupaten Kepulauan Selayar		-	DAU			-
				04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Mayarakat	Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Laporan	26,979,000	DAU	-	1,001,000	25,978,000
				05		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah KK yang mendapat banyuan uang sewa rumah tinggal		Kabupaten Kepulauan Selayar	10 KK	-	DAU		-	-
				06		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	1 kawasan		-	DAU		-	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				07		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh		Kabupaten Kepulauan Selayar		37,586,000	DAU	-	-	37,586,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Cakupan pembinaan penanganan kawasan permukiman kumuh		Kab. Kep Selayar		40,000,000		12,540,500	-	52,540,500
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										-
				01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani	Masyarakat	Kab. Kep Selayar	80 unit	40,000,000	DAK	12,540,500		52,540,500
				02		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					-	DAU			-
				03		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					-	DAU			-
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Presentase PSU yang terpeliharaan dan terbangun		Kab. Kep Selayar		3,695,202,900		75,246,000	-	3,770,448,900
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Masyarakat			3,695,202,900		75,246,000	-	3,770,448,900
				01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan		Kec. Benteng	1 Dokumen	189,200,400	DAU	20,000,000	-	209,200,400

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kelompok Sasaran	Tahun 2023				Rencana Perubahan Tahun 2023		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah	Berkurang	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				02		Penyediaan PSU Perumahan			Kab. Kep Selayar	30 Paket	3,460,802,500	DAU	38,001,100		3,498,803,600
				03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan			Kab. Kep Selayar	1 Dokumen	45,200,000	DAU	17,244,900		62,444,900
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		Kab. Kep Selayar		20,800,000	DAU	-	246,000	20,554,000
					Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Jumlah usaha jasa/pelaksana perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan kecil yang tersertifikasi				20,800,000			246,000	20,554,000
						Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					20,800,000			246,000	20,554,000



Benteng, 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19840104 200903 2 003